

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.698 K/PDT/2011)

Oleh
YUDHA ANDREA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas pengelolaan suatu perseroan, khususnya pada Pasal 79 ayat (2) huruf a jo. Pasal 80. Pada Putusan No. 698/K/Pdt/2011 *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan tidak mempertimbangkan kedudukan PT. Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham minoritas bahwa telah memenuhi syarat 1/10 untuk menyelenggarakan RUPSLB serta tidak memperhatikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung sejak tahun buku terakhir tidak mengadakan RUPST. Kesalahan *judex facti* berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum di kemudian hari bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya dalam perseroan. Hal ini menyebabkan Hakim Mahkamah Agung memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *judex facti* dengan mengabulkan permohonan PT. Dwima Jaya Utama sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam UUPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memperbaiki kesalahan *judex facti* dalam penerapan hukum dan menjelaskan akibat hukum bagi pemegang saham minoritas perseroan terbatas atas penilaian hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex facti*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan (*judicial case study*). Data primer dianalisis dari Putusan yang diteliti, didukung data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan wawancara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) secara tegas mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri. Dasar pertimbangan utamanya adalah kekeliruan pertimbangan *judex facti* dalam menentukan kedudukan hukum Pemohon Kasasi. Hakim Mahkamah Agung menilai Pemohon telah memenuhi prosedur formal UUPT dan AD perseroan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB perseroan sekaligus memposisikan Para Termohon sebagai pihak yang diwajibkan untuk hadir dalam RUPSLB sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Kata Kunci: Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Putusan No.698 K/PDT/2011, RUPSLB.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS BASED ON LAW NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 698 K/PDT/2011)

By

YUDHA ANDREA

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) provides legal protection for minority shareholders in the management of a company, particularly in Article 79 paragraph (2) letter a jo. Article 80. In Decision No. 698/K/Pdt/2011, the judex facti made an error in applying the law by not considering the position of PT. Dwima Jaya Utama as a minority shareholder that has fulfilled the 1/10 requirement to hold an EGMS and did not pay attention to the fact that the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT. Dwima Turangga Gunung have not held an EGMS since the last financial year. Judex facti errors have the potential to cause future losses and legal uncertainty for minority shareholders seeking to protect their interests in the company. This prompted the Supreme Court judges to correct the misapplication of the law by granting PT. Dwima Jaya Utama's petition as a form of legal protection provided by the court to protect the interests and guarantee the rights of minority shareholders as stipulated in the Limited Liability Company Law. This study aims to examine the Supreme Court judges' reasoning in correcting the judex facti error in the application of the law and to explain the legal consequences for minority shareholders of limited liability companies based on the Supreme Court judges' assessment of the judex facti error.

This study employed an empirical normative juridical method with a judicial case study approach. Primary data were analyzed from the decisions studied, supported by secondary data in the form of literature, laws and regulations, and interviews.

The research findings indicate that the Panel of Judges at the cassation level (the Supreme Court) firmly granted the Petitioner's request to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and annulled the District Court's decision. The primary reasoning was the erroneous consideration of the judex facti in determining the legal standing of the Petitioner. The Supreme Court judges assessed that the Applicant had complied with the formal procedures of the Company Law and the Company's Articles of Association. The conclusion of this study confirms that the decision provides strong legal certainty for the Applicant to hold the company's EGMS and positions the Respondents as parties required to attend the EGMS in accordance with Article 80 paragraph (3) letter b of the Company Law.

Keywords: Minority Shareholders, Legal Protection, Limited Liability Company, Decision No. 698 K/PDT/2011, EGMS.